

**POINTER PENUTUPAN EGM TENAGA AHLI OC/OSP
Bogor, 27 s.d 30 April 2019**

1. Ucapan terima kasih atas semangat dalam proses EGM dengan metode yang agak berbeda, semangat yang mudah-mudahan mencerminkan semangat untuk membela masyarakat marginal di permukiman kumuh
2. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi siap untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Beberapa catatan:
 - a. Komponen 1: Kelembagaan Strategi dan Kebijakan**
 - i. Pengurangan kumuh pemahaman OC/OSP sudah agak baik. Pengurangan kumuh 2018 masih meraba-raba kegiatan yang akan dilaksanakan. Akan ditindaklanjuti pasca EGM.
 - ii. Perhitungan kumuh baru sebatas milik KOTAKU, seharusnya di delever ke tingkat kelurahan sehingga paham dengan kondisi kekumuhannya.
 - iii. Tidak ada scenario penaggaran dalam pengurangan kumuh.
 - b. Komponen 2: Integrasi Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas untuk Pemda dan Masyarakat**
 - i. Livelihood :
 - 1) (apresiasi untuk pak suyono). Mampu menjelaskan ruhnya livelihood diperencanaan. Seluruh yang ada diperencanaan itu pentagonal asset.
 - 2) Peserta wilayah 1 : Pemahaman livelihood relative baik.
 - 3) Peserta wilayah 2 : ditingkat OSP belum paham betul, sehingga proses perencanaan parsial. Harus duduk Bersama output untuk peningkatan kehidupannya.
 - 4) OSP minim sekali menstrukturkan dari yang besar ke yang kecil. RPLP akan bagus jika RP2KPKP bagus. Tidak melihat perencanaan (satu data, perencanaan dan satu peta).
 - ii. **Safeguard:**
 - 1) Paparan OSP belum membahas detil tentang safeguard. Pemahaman safeguard sebagai pelengkap bukan yang utama, dan seolah menjadi ganjalan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Saat akan dieksekusi baru paham pentingnya safeguard.
 - 2) Padahal materi tentang safeguard sudah di bahas di ToT tahun lalu dan pelatihan khusus tahun 2017
 - 3) Seharusnya Mainstream Safeguard dilakukan sejak perencanaan. Perlu dipetakan personil yang paham atau tidak untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas
 - iii. **Perencanaan:**
 - 1) Isu kualitas RPLP dan RP2KPKP, tidak mengangkat aspek yang masih lemah.
 - 2) Target penyelesaian dokumen RPLP/RP2KPKP tidak muncul dalam paparan.
 - 3) Belum ada mainstream bencana di aspek perencanaan
 - iv. **CB Pemda:**
 - 1) OC/OSP masih terpaku pada target KPI saja, padahal punya peran dalam pengembangan kapasitas di tingkat pemda.
 - 2) Khusus strategi komunikasi masih lemah untuk mendukung pencapaian program

c. Komponen 3: Pelaksanaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan

- i. Tingkat pemahaman perhitungan kumuh antara Jateng dengan Maluku sangat tinggi gapnya. Maluku perlu ditingkatkan pemahamannya terkait cakupan pelayanan investasi infrastruktur.
- ii. Pakta lapangan sudah dilakukan simulasi, tapi banyak yang hanya menurunkan angka kumuh belum tuntas pengurangan luasan kumuh. KMP perlu tegas agar prioritas capai dulu menurunkan kumuh.
- iii. Teman-teman faskel perlu dipahami melihat masalah utamanya dulu, baru kegiatan yang akan di lakukan.
- iv. Pengendalian OSP harus sampai mengidentifikasi ke tim mana yang diberikan dana BDI, tapi tidak bisa mengurangi kumuh.
- v. Semua OC harus memiliki jadwal kapan lelang dan bagaimana implementasi koordinasi dengan Pokja/Satker.
- vi. Pengendalian kualitas infrastruktur, khususnya penjaminan kualitas infras dan administrasi infra.
- vii. Target pencapaian pengurangan kumuh. Rata-rata kegiatannya masih kebingungan pemilihan kegiatan infrastruktur yang berdampak pada pengurangan kumuh. Perlu dikuatkan kembali.
- viii. Alokasi BDI disebar tidak focus dalam satu wilayah tuntas.
- ix. Khawatir yang dikejar pengurangan kumuh melalui perhitungan pengurangan kumuh, lupa goal menuju permukiman layak huni. Belum mengkaitkan peningkatan kualitas infrastruktur mengkaitkan dengan peningkatan livelihood

d. Komponen 4: Bantuan Teknis

- i. PR Audit BPKP, Hasil Audit sebelumnya, Audit hanya menjadi tugas MK semata.
- ii. Ada potensi temuan BPKP temuan finansial. Tapi tidak tercantum dalam isu strategis di tingkat OC/OSP.
- iii. CB Konsultan: Lebih banyak membahas di lokasi peningkatan, sementara di lokasi pencegahan banyak terlupakan. Stigma pendamping lokasi pencegahan adalah fasilitator kapasitas rendah
- iv. Mengingatkan loan (Pasca bencana, Scale UP), NSUP Reguler.
- v. Mengingatkan entrain Sp2D online. Agar segera entry dan upload.
- vi. OC/OSP sebagai pengendali :
 - 1) Secara substansi :
 - a. Beberapa peserta mengungkapkan Belajar tentang pengurangan kumuh secara otodidak atau tanpa bimbingan.
 - b. Beberapa peserta mengungkapkan RPLP (NTB), proses RPLP perlu berkali-kali.
 - 2) Secara Program :
 - a. Peran OSP sebagai pengendali proyek masih lepas (terkait dengan waktu)
 - b. Intensitas kunjungan lapangan semakin rendah apabila jauh dari OSP.
 - c. Ini sangat krusial perlu diperbaiki, seharusnya diperkuat untuk sering kelapangan .
- vii. PPM:
 - 1) PPM hanya disampaikan progresnya, tidak menampilkan Analisa. PPM tidak dijadikan early warning system
 - 2) Proses pelibatan partisipasi masyarakat masih rendah.
 - 3) PPM format reportnya terlalu Panjang. Perlu solusi penyederhanaan.
 - 4) Minimnya sosialisasi dan CB terkait dengan PPM (awarnes proud dan penanganan masalah secara ideal)

- 5) Pengendali PPM hanya sampai dengan HCU OSP.
 - 6) Harus ada perhatian lebih untuk OSP 9, perlu konten local khusus terkait PPM.
 - 7) Khususnya pemahaman konteks tentang pengaduan beragam. Perlu kontens atau istilah local terkait dengan istilah pengaduan.
 - 8) Perlu pendekatan yang berbeda antara Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Gap terkait dengan pemahaman. Perlu lebih intens dalam penguatan di OSP luar jawa.
- viii. Kenaikan gaji askot mandiri ? I wilayah 1 ada di Babel dan Kepri sudah menaikkan gaji. Dikarenakan ada kenaikan di DIPA. Lainnya tidak mau karena belum ada surat direktur. Padahal rencananya gaji akan disesuaikan dengan awal. Bagaimana propinsi yang sudah menaikkan gaji ?
- ix. Audit KAP bisa dibuatkan MOU dengan Auditor tahun 2017. Uang dikeluarkan tahun 2017, pelaksanaan 2018 , BPKP tidak mempersalahkan. Kecuali di NTT tidak disertakan MOU dengan KAP.
- x. **SIM:**
- o Pembahasan progress entry data
 - o Evaluasi, review dan rekomendasi hasil pelatihan
 - o Rencana kegiatan tahun 2018.
 - o TA SIM OC/OSP rendah motivasu membatu merancang kebutuhan glossary di tingkat lapang.
 - o Hitungan pemanfaat 7 juta, kurang 3 juta. Namun dari data masih sering double data, dikarenakan NIKnya tidak ada. Perlu clearing data.
 - o Hitungan manual dengan SIM : Pemanfaat berdasarkan Jumlah (Infra) sedangkan sim (by name by addres) perlu ada ketegasan terkait dengan sim.
 - o Sim tidak ada dalam isu strategi osp (Kecuali DIY dan Palu) . Palu menyediakan pelaku sim di tingkat propinsi yang dibiayai oleh pemda. Terutama data-data yang dari pihak luar (pemda).
 - o Jateng seakan terlalu menyepelkan moment kegiatan. Sehingga tidak menyiapkan secara baik.
 - o Data-data terkait perhitungan kumuh tahun sebelumnya harus ditarik mundur. Kesulitan mendapatkan data kolaborasi yang kontraktual. Perlu diperjelas peran, deliveri system, dan pemahaman peran sim untuk stakeholder.
 - o Dukungan sarana dan prasarana untuk sim (server). Butuh penambahan server atau pembelian.
 - o Pencapaian data : lebih ditekankan untuk lokasi-lokasi besar (jawa barat), perlu BKO untuk mempercepat input.
 - o Dukungan alokasi biaya untuk paket data dan hardware.
 - o Pembagian peran input data sim, dari setiap tahap. Tidak tertumpu di asmandat. Apakah perlu surat penekanan terkait peran inputing data sim.

e. Strategi dan Rencana Kerja

- i. Perlu ditingkatkan bagaimana menginterkoneksi antar USK untuk pencapaian program.
- ii. Banyak paparan OC/OSP masih berupa progress belum terlihat strategi untuk menyelesaikan persoalan yang masih ada
- iii. Tampilan di paparan, tidak ada strategi untuk mendukung pencairan.
- iv. Kurang begitu memahami proses yang ada dilapangan (data) kurang akurat)

- v. Permasalahan sering kali hanya menjadi tanggung jawab USK tertentu, belum terlihat kolaborasi penanganan dalam tim work.
 - vi. Ada Distorsi pemahaman antara KMP dan OSP
 - vii. KMP perlu memberikan support ke OSP.
 - viii. Propinsi yang perlu perhatian khusus :
 - f. Papua Barat
 - g. Papua
 - h. Sulsel
 - i. Maluku Utara
 - j. Aceh
 - k. Banten
 - Instrumen akuntabel (PPM, Audit KAP, Audit BPKP) masih melihat kulit-kulitnya, belum dianalisis temuan-temuan.
 - OSP/OC sibuk melengkapi kuota, belum bagaiman mempertajam penguatkan kapasitas pelaku.
 - Pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan KPI perlu dikuatkan (co. Apa sanitasi dasar, sanitasi layak, dll)
 - Strategi harusnya memastikan. Bagaimana Caranya memastikan. Contoh infrastruktur berkualitas (langkah-langkah teknis belum terlihat secara baik)
4. Semua catatan tersebut dirumuskan dalam recncana kerja, jangan hanya sekedar ditandatangani tapi dikendalikan dengan ketat baik oleh KMP maupun KMW
 5. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu acara ini dengan baik dan apresiasasi semangat dalam EGM dan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan serius dengan hati
 6. Selamat kembali ke tempat tujuan